

Volume 15 No. 19, Desember 2014

ISSN 1412-1689

Suluah

Media Komunikasi Kesejarahan, Kemasyarakatan dan Kebudayaan
Balai Pelestarian Nilai Budaya Padang

PENDIDIKAN DAN PERUBAHAN SOSIAL

ENSEMBEL MUSIK ANAK ALTERNATIF PEMBELAJARAN MUSIK
S AISYIAH 1 NANGGALO PADANG

DAN KEBUDAYAAN
B PADANG

KEARIFAN TRADISIONAL DAN ALIH PENGETAHUAN TEKNOLOGI
AN KAPAL TRADISIONAL DI DAERAH AIR HAJI LEWAT TUTURAN
G TUO BAGAN'

MEMBENTUK KARAKTER MELALUI PENANAMAN NILAI-NILAI BUDAYA
RUMAH GADANG MINANGKABAU

DAFTAR ISI

Ensambel Musik Anak Alternatif Pembelajaran Musik di SD Plus Aisyiyah 1 Nanggalo Padang
Mutiara Al Husna (1)

Kurikulum Muatan Lokal Bahasa Rejang di Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu
Undri (9)

Dinamika Perkembangan MTI Tabek Gadang Padang Japang
Hariadi (26)

Membentuk Karakter Melalui Penanaman Nilai-Nilai Budaya Rumah Gadang Minangkabau
Hasanadi (42)

Partisipasi Masyarakat Terhadap Penanaman Harga Diri Bagi Pelaku Prostitusi di Minangkabau
Rismadona (60)

Inklusi Gerakan Nyata Pembebasan Diskriminasi, Benarkah?
Silvia Devi (72)

Tradisi Basapa Ke Gunung Bonsu Nagari Taeh Bukik Kabupaten Limapuluh Kota Dalam Perspektif Sejarah
Zusneli Zubir (82)

Melacak Kearifan Tradisional dan Alih Pengetahuan Teknologi Pembuatan Kapal Tradisional di Daerah Air Haji Lewat Tuturan 'Si Tukang Tuo Bagan'
Jumhari (89)

Tata Kelola Sawah Dan *Durung* Di Tengah Tradisi Rantau Masyarakat Pulau Bawean M.
Alie Humaedi (100)

Migrasi Orang Minangkabau Ke Negeri Sembilan
Witrianto (117)

Nagari Koto Tuo Kab. Lima Puluh Kota Pada Masa Darurat Sipil (1948-1949)
Dedi Asmara (126)

Komunitas Yahudi di Sumatra's Westkust
Romi Zarman (138)

Kontestasi dan Konflik Elite Tradisional dan Elite Modern Minangkabau dalam Media Massa di Kota Bukittinggi Masa Kolonial
Yudhi Andoni (146)

Ideologi Edward Abbey dalam Novel *Fire On The Mountain* : Suatu Studi Awal Ekologi Sastra
Eva Najma (157)

Resensi Buku
Firdaus Marbun (166)

INKLUSI GERAKAN NYATA PEMBEBASAN DISKRIMINASI, BENARKAH?

Silvia Devi, S.Sos
BPNB Padang
silvia160681@yahoo.co.id

ABSTRAK

Pendidikan sebagai hak bagi seluruh manusia di mana pun berada dan bagaimana pun keadaannya. Kenyataan ini yang menggerakkan PBB melaksanakan pendidikan secara inklusi dengan deklarasinya yakni *Declaration of Human Right 1948*. Berangkat dari itu kemudian diadakan pertemuan-pertemuan selanjutnya dalam memperjuangkan hak pendidikan tanpa didiskriminasi dan melahirkan Kerangka Dasar Pendidikan untuk Semua (*Education For All*), pada *Deklarasi Bangkok tentang pendidikan*. Indonseia sebagai salah satu anggota PBB turut serta mendukung dengan mendeklarasikan “Indonesia menuju Pendidikan Inklusi” dengan didasari berbagai pertemuan. Langkah nyata yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah mengeluarkan undang-undang dan diikuti peraturan-peraturan lainnya terkait dengan pelaksanaan pendidikan inklusi. Akan tetapi dalam kenyataan di lapangan pelaksanaan pendidikan inklusi tidak mudah seperti membalikkan telapak tangan. Pelaksanaan inklusi masih banyak memperlihatkan diskriminasi. Banyak sebab yang menyebabkan hal ini terjadi. Oleh karena itu harus dilakukan berbagai upaya untuk mencari solusi agar pelaksanaan pendidikan inklusi bisa berhasil dan tidak ada lagi diskriminasi yang dirasakan. Metode penelitian yang dilakukan dalam kajian inklusi ini adalah dengan metode studi kasus yang terjadi pada lembaga pendidikan inklusi tingkat pra sekolah yakni TK Istiqamah Kecamatan Ampek Angkek. Teknik pengumpulan data dengan observasi dan wawancara mendalam terhadap tenaga pendidik dan orangtua anak inklusi. Sedangkan tujuan penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana sejarah pendidikan inklusi, bagaimana pelaksanaan pendidikan inklusi, dan apakah pendidikan inklusi dapat membebaskan diskriminasi yang selama ini ada.

Kata kunci: inklusi, pembebasan diskriminasi

Pendahuluan

Pendidikan adalah salah satu cara dalam meningkatkan sumber daya manusia. Pendidikan adalah hak seluruh warga negara di mana pun berada dan bagaimana pun kondisinya. Hal ini tertera dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 :

pasal 31 : Ayat 1 “Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan”,

Ayat 2: Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional, yang diatur dengan undang-undang.”

Melalui pendidikan maka setiap warga negara memiliki kesempatan dalam pengembangan setiap potensi yang dimilikinya. Bagi masyarakat secara umum tidak terlalu sulit untuk mendapatkan pendidikan. Akan tetapi, berbeda dengan masyarakat yang memiliki kecacatan, kelainan atau berkebutuhan khusus. Mereka banyak mengalami hambatan dalam menerima pendidikan, meskipun pendidikan khusus seperti Sekolah Luar Biasa¹ jumlahnya banyak,

¹ Selanjutnya dalam makalah ini akan disingkat dengan sebutan SLB.

akan tetapi letak yang cukup jauh dari tempat tinggal mereka dan juga biaya yang cukup mahal dalam menempuh pendidikan menjadi permasalahan yang sampai saat ini masih dialami.

Keberadaan mereka di tengah-tengah masyarakat masih dianggap negatif, bahkan yang lebih ekstrim adalah pandangan bahwa mereka mengganggu kehidupan masyarakat yang dijalani oleh masyarakat normal. Sehingga tak jarang masyarakat yang berkebutuhan khusus tersebut sejak kecil dikucilkan dari tengah-tengah kehidupan masyarakat. Hal ini banyak dilakukan oleh keluarga terdekat dengan berbagai alasan. Salah satu alasan tersebut adalah malu karena memiliki anak cacat yang sering dianggap sebagai kutukan bagi keluarga mereka.

Saat ini penyebutan anak cacat tidak lagi digunakan, hal ini karena menimbulkan label negatif terhadap anak tersebut. Oleh karena itu bagi anak cacat atau memiliki perbedaan disebut sebagai anak berkebutuhan khusus. Pengertian anak berkebutuhan khusus tidak saja terbatas karena kekurangan yang dimiliki, tetapi juga berbagai kelebihan yang dimiliki seperti anak jenius dan anak indigo.

Untuk mengakomodir kebutuhan anak berkebutuhan khusus dalam memperoleh pendidikan yang sama bersama anak-anak normal maka mereka diikutkan ke dalam lembaga pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusi. Pendidikan inklusi menurut Mudjito, dkk (2012:5) adalah pendidikan yang diselenggarakan di sekolah dengan peserta didik anak-anak normal fisik dan mental.

Memperhatikan betapa pentingnya pendidikan diperoleh meskipun warga negara memiliki kekurangan maka lahirilah undang-undang yang memperhatikan hak warga negara tersebut, yakni Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Pasal 3 : Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan

kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Berahlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Pasal 5 : Ayat (1) :Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.

Ayat (2) :Warga negara yang mempunyai kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus

Ayat (3) :Warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus

Ayat (4) : Warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus.

Pasal 32 : Ayat (1) : Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik,emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.

Ayat (2) : Pendidikan layanan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang

terpencil, dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi.

Undang-undang di atas adalah sebagai bentuk landasan yuridis pelaksanaan pendidikan inklusi yang di terapkan di Indonesia. Selanjutnya dalam makalah ini akan dijelaskan bagaimanakah sejarah pendidikan inklusi? Bagaimanakah pelaksanaan pendidikan inklusi? Apakah pendidikan inklusi dapat membebaskan diskriminasi yang selama ini ada??

Sejarah Pendidikan Inklusi

Lahirnya pendidikan inklusi di Indonesia didasari dari berbagai pertemuan internasional antara lain pada dokumen *Declaration of Human Right 1948*, *Convention on the Right of Childs 1989*, *Life long Education for All Bangkok 1995*, *The Salamanca Statement on Inclusive Education 1994*, *The Dakkar Statement 2000*, Kerangka Dasar Pendidikan untuk Semua (*Education For All*), *Deklarasi Bangkok tentang pendidikan*.

Indonesia mengaggas pendidikan inklusi didasari beberapa pertemuan yakni *Deklarasi Yogyakarta 17 Maret 2001*, *Deklarasi Bandung : Indonesia Menuju Inklusi, Kongres Internasional ke 8 tentang mengikutsertakan anak penyandang kecatatan ke dalam masyarakat :Menuju Kewarganegaraan yang penuh 15-16 Juni 2004*.² *Deklarasi*

² "Indonesia menuju Pendidikan Inklusi",

a. Menjamin setiap anak berkelainan dan anak berkebutuhan khusus lainnya mendapatkan kesempatan akses dalam segala aspek kehidupan, baik dalam bidang pendidikan, kesehatan, sosial, kesejahteraan, keamanan, maupun bidang lainnya, sehingga menjadi generasi penerus yang handal.

b. Menjamin setiap anak berkelainan dan anak berkebutuhan khusus lainnya sebagai individu yang bermartabat, untuk mendapatkan perlakuan yang manusiawi, pendidikan yang bermutu dan sesuai dengan potensi dan kebutuhan masyarakat, tanpa perlakuan diskriminatif yang merugikan eksistensi kehidupannya baik secara fisik, psikologis,

Bukittinggi tahun 2005 tentang "Pendidikan untuk semua".³

Berdasarkan pertemuan-pertemuan tersebut maka dikeluarkanlah Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Depdiknas No.380 /C.66/MN/2003, 20 Januari 2003 perihal Pendidikan Inklusi bahwa di setiap Kabupaten/ Kota di seluruh Indonesia sekurang kurangnya harus ada 4 sekolah penyelenggara inklusi yaitu di jenjang Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan masing-masing minimal satu sekolah.

Sebelum ada penyelenggaraan pendidikan inklusi, pendidikan bagi anak yang berkebutuhan khusus diselenggarakan dengan *sistem segregasi*

ekonomis, sosiologis, hukum, politis maupun kultural.

c. Menyelenggarakan dan mengembangkan pengelolaan pendidikan inklusif yang ditunjang kerja sama yang sinergis dan produktif antara pemerintah, institusi pendidikan, institusi terkait, dunia usaha dan industri, orang tua serta masyarakat.

d. Menciptakan lingkungan yang mendukung bagi anak berkelainan dan anak berkebutuhan khusus lainnya, sehingga memungkinkan mereka dapat mengembangkan keunikan potensinya secara optimal

e. Menjamin kebebasan anak berkelainan dan anak berkebutuhan khusus lainnya untuk berinteraksi baik secara reaktif maupun proaktif dengan siapapun, kapanpun dan dilingkungan manapun, dengan meminimalkan hambatan

f. Mempromosikan dan mensosialisasikan layanan pendidikan inklusif melalui media masa, forum ilmiah, pendidikan, pelatihan, dan lainnya secara berkesinambungan.

g. Menyusun rencana aksi (action plan) dan pendanaannya untuk pemenuhan aksesibilitas fisik dan non fisik, layanan pendidikan yang berkualitas, kesehatan, rekreasi, kesejahteraan bagi semua anak berkelainan dan anak berkebutuhan khusus lainnya. <http://pendidikanabk.blogspot.com> diakses tanggal 1 maret 2014 jam 15.00

³ yang antara lain menguraikan :bagaimana penyelenggaraan dan pengembangan pengelolaan pendidikan inklusi ditunjang kerjasama yang sinergis dan produktif antara pemerintah, institusi pendidikan, istitusi terkait, dunia usaha dan industri, orangtua dan masyarakat. <http://pendidikanabk.blogspot.com> diakses tanggal 1 maret 2014 jam 15.00

atau secara eksklusif⁴. Adapun maksud dari bentuk pendidikan ini adalah sebagai wujud pemerintah Indonesia dalam memperhatikan dan upaya memenuhi kebutuhan pendidikan terhadap mereka yang berkebutuhan khusus yang sampai saat ini masih terselenggara dengan baik di berbagai daerah. SLB ini dibentuk sesuai dengan jenjang pendidikan yakni tingkat pra sekolah (TKLB), tingkat dasar (SDLB), tingkat pertama (SMPLB), tingkat menengah (SMALB). Pelaksanaan pada satu SLB bisa terdapat TKLB sampai SMALB, bisa juga masing-masing tingkat saja, seperti hanya SDLB atau hanya SMPLB.

Selain bentuk pendidikan khusus seperti di atas, ada juga bentuk satuan pendidikan yang dibentuk khusus sesuai dengan jenis kecacatan si anak, seperti SLB bagian A untuk tunanetra, SLB bagian B untuk tunarungu, SLB bagian C untuk tunagrahita, SLB bagian D untuk tunadaksa, SLB bagian E untuk tunalaras dan SLB bagian G untuk cacat ganda.

Pada kenyataannya yang terjadi, sistem pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus yang ditempatkan dalam Sekolah Luar Biasa ternyata justru semakin mempersempit anak dalam mengembangkan segala potensi yang dimiliki di masing-masing anak. Selain itu bagi anak-anak yang ditempatkan secara eksklusif ini ada perasaan terasing karena perbedaan yang dimilikinya bila dibandingkan dengan teman-teman seusianya. Padahal anak tersebut dalam kenyataannya juga akan berinteraksi dengan masyarakat yang lebih luas yakni lingkungan di sekitar tempat tinggal maupaun lingkungan lain yang ada di tengah masyarakat yang bercampur baur

antara yang mengalami kebutuhan khusus maupun yang normal.

Pelaksanaan pendidikan inklusi

Diselenggarakannya pendidikan inklusi adalah sebagai upaya bagi anak-anak berkebutuhan khusus mendapatkan tempat dan bimbingan dalam upaya mengembangkan segala potensi yang dimilikinya menjadi modal dalam meningkatkan kualitas hidup mereka. Sehingga keberadaan mereka tidak lagi dianggap sebelah mata, atau justru menyusahakan karena dianggap mengganggu akibat kekurangan yang dimiliki oleh mereka. Kekurangan yang ada pada anak-anak berkebutuhan khusus akan menjadi suatu kelebihan yang sangat menunjang dalam upaya peningkatan kualitas hidup mereka.

Di Sumatera Barat⁵ pendidikan inklusi baru dilaksanakan sebanyak 84 unit pada tingkat SD, 21 unit pada tingkat SMP dan 74 unit pada tingkat SMA/SMK (<http://www.antarasumut.com>). Penelitian mengenai pendidikan inklusi dari tingkat SD sampai SMA sudah banyak dilakukan. Berdasarkan pengamatan di lapangan sementara ini belum didapatkan data penyelenggaraan pendidikan inklusi tingkat TK yang masuk ke Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Barat. Padahal pendidikan inklusi idealnya dilaksanakan mulai dari lembaga pendidikan terendah yakni lembaga pendidikan pra sekolah misalnya Taman Kanak-Kanak.

Sebab apabila anak berkebutuhan khusus telah mendapatkan pendidikan inklusi sejak dini maka akan berdampak baik bagi anak berkebutuhan khusus tersebut dalam menghadapi kehidupannya, khususnya dalam menempuh pendidikan

⁴Maksud eksklusif di sini menurut peneliti adalah penyebutan bagi anak yang berkebutuhan khusus atau menderita jenis kecatatan yang dikelompokkan pada kelompok tertentu menerima pendidikan dengan segala kekhususan, yakni pola pendidikan yang khusus, metode yang khusus, tenaga pengajar yang khusus dan tempat yang dikhususkan pula.

⁵ Dari sebanyak 19 kota/kabupaten di Sumatera Barat baru 3 kota/kabupaten yang telah menyelenggarakan pendidikan inklusi yakni Kota Payakumbuh, Kota Padang dan Kabupaten Pasaman. Akan tetapi penyelenggaraan pendidikan inklusi pada tingkat PAUD belum terdapat satu sekolah pun.

inklusi. Diselenggarakannya pendidikan inklusi dari tingkat pendidikan pra sekolah, maka diharapkan anak berkebutuhan khusus memiliki kemampuan yang maksimal untuk dapat melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi.

Realita pelaksanaan pendidikan inklusi selama ini dalam 2 kategori.

1. Kategori belum berhasil

Berbagai hasil penelitian banyak menunjukkan terjadinya diskriminasi terhadap anak berkebutuhan khusus baik dari orang tua, pendidik, maupun anak-anak lainnya. Seperti hasil penelitian Irwani (2011) yang berjudul *Perlakuan Orang Tua Terhadap Anak Penyandang Cacat Mental Studi di Kelurahan Tarok Dipo Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi* yang hasil penelitiannya menyatakan bahwa perlakuan orangtua kepada anak penyandang cacat adalah dikucilkan, disembunyikan dari masyarakat, memberikan perhatian yang lebih kepada anak. Perlakuan ini memberikan dampak yang buruk terhadap anak cacat tersebut yakni tidak mandiri, berbicara sendiri kurang terarah, suka menyendiri dan bermenung, daya ingat lemah, dan tingkah laku bersifat aneh.

Lain lagi dengan penelitian yang dilakukan oleh Ayu (2013) yang berjudul *Interaksi Pihak Sekolah Terhadap Siswa Berkebutuhan Khusus di Sekolah Inklusi Studi Kasus: SDN 03 Kota Bengkulu*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh pihak sekolah di SDN 03 Kota Bengkulu baik itu kepala sekolah, guru maupun karyawan non guru melaksanakan interaksi dengan anak berkebutuhan khusus dengan menggunakan simbol – simbol tertentu, antara lain dengan menyapa, mengajak ngobrol, memuji dan memberi motivasi. Akan tetapi interaksi tersebut juga mengalami beberapa kendala antara lain dikarenakan kurangnya pengetahuan guru bagaimana seharusnya cara yang baik dalam berinteraksi dengan anak berkebutuhan khusus dikarenakan

tidak memiliki latar belakang pendidikan mengenai anak berkebutuhan khusus, sehingga interaksi yang dilakukan oleh para guru berdasarkan atas tafsiran mereka saja. Kendala lain adalah kurangnya media pembelajaran sebagai media yang dapat mempermudah pemahaman antara anak berkebutuhan khusus dengan para guru pada saat interaksi berlangsung.

Penelitian Febriardi (2012) yang berjudul *Anak Autis di Sekolah Inklusi Studi Kasus Pada Teman Sebaya Pada Anak Autis Dua SD di Kota Padang* menunjukkan hasil bahwa perilaku yang dilakukan oleh teman sebaya pada anak autis terbagi ke dalam dua situasi yakni di dalam dan di luar kelas. Perilaku di dalam kelas yakni perilaku jahil, tidak diperdulikan, mengalah dan perilaku senang. Sedangkan perilaku yang di luar kelas yakni perilaku nakal dan ancaman pada anak autis.

Dari beberapa hasil penelitian di atas disimpulkan bahwa pendidikan inklusi belum berhasil karena pelaksanaannya belum berjalan dengan baik dilihat dari kenyataan anak berkebutuhan khusus yang menjadi subyek penelitian tersebut banyak mengalami diskriminasi. Hal ini dikarenakan masih kurangnya partisipasi masyarakat baik itu orang tua, pendidik maupun anak-anak di sekolah sebagai teman sebaya dalam menyikapi penyelenggaraan pendidikan inklusi.

2. Berhasil

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, ternyata tidak semua penyelenggara pendidikan inklusi mengalami kegagalan. Salah satu jenjang pendidikan yang berhasil melaksanakan pendidikan inklusi tersebut adalah pada jenjang pra sekolah yakni TK Istiqamah di Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam Propinsi Sumatera Barat. Di TK ini sudah semenjak tahun 2011 sudah berani menerima 1 (satu) anak berkebutuhan khusus bergabung dengan anak-anak normal guna mendapatkan pendidikan inklusi. Kemudian tahun 2012 juga

menerima 1(satu) orang lagi anak berkebutuhan khusus. Pada tahun 2013 menerima sebanyak 5 (lima) orang anak berkebutuhan khusus, dan pada tahun 2014 jumlahnya meningkat menjadi 7 (tujuh) orang anak berkebutuhan khusus. Adapun pelaksanaan pendidikan inklusi yang diterapkan yakni dengan memulainya dengan rasa cinta dan empati.

Perlunya penanaman rasa cinta dan empati ini dikarenakan bahwa tak ada satupun manusia yang mau dilahirkan tidak sempurna. Oleh karena itu apabila setiap orang menyadari itu maka bagaimanapun kondisi anak yang lahir akan bisa tumbuh kembang dengan baik. Dengan rasa cinta dan empati maka kita akan menyayangi mereka yang berkebutuhan khusus, dan bukti rasa sayang tersebut akan membuat semangat yang terus tumbuh dan berusaha agar bisa mendapat pendidikan yang baik tanpa harus memaksakan secara egois. Seperti yang diungkapkan oleh Denny guru TK Istiqamah (wawancara tanggal 12 Januari 2014) berikut ini :

“...Rasa cinta adalah modal utama dalam memberikan pendidikan pada semua anak. Tak terkecuali pada anak berkebutuhan khusus. Tak ada satupun anak yang mau lahir dalam keadaan tak sempurna. Begitupun perasaan orangtua dari anak tersebut. Tetapi setiap mahluk Tuhan memiliki kelebihan di samping kekurangan. Oleh karena itu yang dituntut adalah rasa bersyukur terhadap Tuhan dan berusaha memberikan kasih sayang dan pendidikan yang baik terhadap anak kita tersebut...”

Pendidikan inklusi tidak akan berjalan dengan baik apabila modal utama yakni sumberdaya manusia yang tidak memiliki rasa empati dan rasa cinta. Meskipun sudah diberikan modul, kurikulum, dan perlengkapan yang lengkap dan canggih sekalipun.

Mengapa??? Karena pengertian inklusi sebenarnya tidak hanya sekedar menggabungkan anak berkebutuhan khusus ke dalam kelas-kelas regional bersama anak-anak normal. Tetapi pengertian inklusi yang sangat perlu untuk dipahami terlebih dahulu adalah memberikan pembelajaran yang ramah. Maksudnya yakni tidak hanya sekedar menggabungkan kemudian tetap belajar secara reguler dan membiarkan anak berkebutuhan khusus mengikuti kegiatan belajar sebagaimana layaknya anak normal.

Pembelajaran yang ramah merujuk Tulkit Lingkungan Inklusif, Ramah Terhadap Pembelajaran, (2007:4) yang dimaksud adalah memahami bahwa semua anak memiliki hak untuk belajar mengembangkan semua potensi yang dimilikinya seoptimal mungkin dalam lingkungan yang nyaman dan terbuka. Menjadi “ramah” apabila keterlibatan dan partisipasi semua pihak dalam pembelajaran tercipta secara alami dengan baik.

Hal yang selalu dilakukan oleh para guru yang ada di TK Istiqamah adalah dengan selalu memotivasi anak secara keseluruhan untuk selalu bersyukur atas semua keadaan yang kita terima. Anak berkebutuhan khusus yang ada di TK Istiqamah ini tidak pernah dipaksa dalam menerima pembelajaran. Mereka dibiarkan secara santai dalam menerima pembelajaran. Hal ini karena anak-anak tersebut memiliki kebutuhan khusus seperti *hyperaktif* , *autis*, *downsyndrom* dan ada juga yang mengalami keterlambatan bicara.

Masing-masing anak ini memiliki cara yang berbeda dalam menanganinya. Ketika sedang belajar maka akan dipandu dengan satu atau dua guru pendamping. Sehingga mereka pun tidak” mengganggu” keberlangsungan belajar mengajar. Yang terpenting dalam menerima anak berkebutuhan khusus pada sekolah umum adalah pemberian pengertian kepada anak-anak didik dan terutama sekali adalah para

orangtua. Tidak mudah untuk mensosialisasikan hal ini. Seperti yang diungkapkan oleh Wendy kepala sekolah TK Istiqamah (wawancara tanggal 14 Januari 2014) berikut ini :

“...dahulu tahun 2011 waktu kami pertama kali menerima anak berkebutuhan khusus, para wali murid pada marah dan berkata kasar pada kami. Mereka mengira nanti anak tersebut bisa memberi dampak buruk pada anak mereka. Selain tu mereka juga menganggap rendah sekolah ini apabila menerima anak berkebutuhan khusus. Lalu dengan berupaya keras kami terus merangkul wali murid. Kemudian mengundang para wali murid untuk bersama-sama berdiskusi bagaimana pandangan mereka terhadap keberadaan anak berkebutuhan khusus tersebut...”

Upaya dalam mensosialisasikan mengenai keberadaan anak berkebutuhan khusus yang ada di lingkungan sekitar memang tidak mudah. Apalagi bila berhadapan dengan orangtua yang memang sangat membenci anak yang berkebutuhan khusus. Banyak sebab mereka tidak menyukai keberadaan anak berkebutuhan khusus dan yang terutama sebabnya adalah kurangnya pengetahuan bagaimana menghadapi anak berkebutuhan khusus. Mereka kebanyakan menganggap adanya anak berkebutuhan khusus terutama anak-anak yang berkategori “berat” dan mereka sebut anak cacat dianggap sebagai kutukan bagi keluarga. Oleh karena itu mereka takut apabila anak mereka berinteraksi dengan anak “cacat” tersebut akan terkena dampak kutukan pada mereka. Usaha yang terus dilakukan untuk memberi pengertian mengenai keberadaan anak berkebutuhan khusus di lingkungan sekitar kita adalah dengan terus mengundang wali murid, seperti

yang diungkapkan oleh Wendy kepala sekolah TK Istiqamah (wawancara tanggal 15 Januari 2014) berikut ini:

“...Kami katakan pada mereka bagaimana seandainya anak berkebutuhan khusus itu adalah anak mereka, keponakan mereka atau bagian dari keluarga mereka. Apakah mereka mau apabila anak mereka didiskriminasikan, di ejek, atau disakiti. Kami katakan bahwa tidak ada satu orangtua pun di dunia ini yang menginginkan anak mereka memiliki kekurangan. Begitu pun sang anak yang tidak menginginkan kekurangan tersebut. Tetapi ini adalah kuasa Tuhan. Tidak ada satu pun hamba yang bisa menolak kehadiran mereka. Kami meyakinkan bahwa anak ini memiliki hak sebagaimana anak secara umumnya, dan kewajiban kitalah untuk memberikan kasih sayang dan pendidikan yang pantas untuk mereka. Alhamdulillah yang terjadi sekarang justru mereka sangat menyayangi anak-anak berkebutuhan khusus tersebut sebagaimana anak mereka sendiri...”

Tidak hanya sampai pada pemberian pengertian mengenai bagaimana keberadaan anak berkebutuhan khusus tersebut saja. Tetapi yang terpenting pada saat anak akan diberikan pendidikan dibutuhkan partisipasi orangtua sebagai orang yang terdekat dengan sang anak. Apabila orangtua mengerti dengan segala kebutuhan anak mereka maka akan

mudah anak dalam menerima pendidikan. Pendidikan dimulai dari dalam rumah, kemudian dilanjutkan pada pendidikan sekolah. Apabila pendidikan di rumah tidak ada kerjasama yang baik antara anak dengan orangtua, maka akan mengalami kesulitan juga pendidikan di sekolah. Hal ini dikarenakan waktu pada anak usia dini lebih banyak interaksinya dengan orang tua. Kemampuan para guru di sekolah terbatas. Dengan adanya kerjasama yang baik antara anak, orangtua, dan para guru, maka pendidikan inklusi yang diberikan kepada anak berkebutuhan khusus akan berjalan dengan baik.

Belajar dari pengalaman kegagalan dan keberhasilan

Partisipasi menjadi hal yang terpenting dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi. Banyak definisi konsep partisipasi yang dinyatakan oleh berbagai ahli. Antara lain menurut Soetrisno (1995) adalah kemauan rakyat untuk mendukung secara mutlak program-program pemerintah yang dirancang dan ditentukan oleh pemerintah. Mikkelsen (2001) mendefinisikan partisipasi adalah keterlibatan secara aktif seseorang atau kelompok orang dalam suatu kegiatan yang dimulai dari suatu proses perencanaan, pelaksanaan sampai dengan evaluasi dari kegiatan tersebut berdasarkan aturan yang sudah ditetapkan. Sedangkan menurut Ray Jennings, dalam (Mikkelsen, 2001) menggambarkan partisipasi secara bervariasi sebagai sarana dan tujuan, sama pentingnya (esensial) antara praktek agensi dan praktek lapangan, dan sebagai proses pendidikan dan pemberdayaan yang perlu bagi perbaikan keseimbangan kekuasaan antara kelompok kaya dan miskin.

Pada setiap program pendidikan maka berbagai aspek harus diperhatikan dan dipersiapkan dengan baik antara lain kebijakan pendidikan, kurikulum, media pembelajaran, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, anak didik, pengawas dan penilik, orang tua dan masyarakat secara umum. Agar bisa mencapai pendidikan

inklusi yang sesuai dengan dasar keluarnya kebijakan tersebut, maka masyarakat harus terlibat aktif di dalam mewujudkannya.

Pemahaman mengenai pendidikan inklusi harus selalu didengungkan atau disosialisasikan ke seluruh lapisan masyarakat. Harus dipahami bahwa pendidikan inklusi tidak sebatas menggabungkan anak-anak berkebutuhan khusus dalam satu sekolah dengan anak-anak normal. Akan tetapi inklusi di sini diartikan sebagai sekolah yang menerapkan proses pembelajaran yang ramah. Maksud ramah di sini adalah lingkungan yang nyaman dan terbuka sehingga anak berkebutuhan khusus tersebut bisa mendapatkan pendidikan yang optimal dalam proses pengembangan potensi yang dimilikinya. Jadi pendidikan inklusi yang “ramah” akan bisa terjalin dengan baik jika masyarakat sebagai pihak yang terlibat dalam kebijakan ini ikut berperan serta belajar dan memahami keberagaman dari setiap anak berkebutuhan khusus. Penekanannya adalah bahwa setiap anak memiliki potensi dan keunikan masing-masing dan masyarakat terlibat mengoptimalkan segala kelebihan yang dimiliki oleh setiap anak berkebutuhan khusus dengan tidak mendiskriminasikan dari kekurangan yang dimiliki mereka.

Kesimpulan

Penyelenggaraan pendidikan inklusi tidak mudah. Namun, upaya yang telah dilakukan sudah merupakan tindakan yang jauh lebih baik apabila dibandingkan dengan sistem segregasi yang dulu pernah diterapkan sampai saat ini. Secara bertahap pendidikan inklusi diterapkan bagi anak-anak berkebutuhan khusus yang tergolong ringan. Sedangkan yang tergolong berat masih harus dilakukan secara segregasi, dikarenakan butuh kesiapan mental bagi tenaga pendidik yang nantinya akan mendidik anak tersebut. Selain itu perlu modul dan sarana dan prasarana yang lengkap dan memudahkan bagi si

anak dalam upaya mendukung pendidikan yang akan mereka terima.

Saran

Pemerintah sebagai penanggungjawab utama penyelenggaraan pendidikan bagi warganya, maka tidak hanya sekedar sosialisasi tetapi juga harus banyak memberikan dukungan. Sebuah pendidikan dapat berjalan dengan baik dengan didukung sumberdaya yang bermutu, fasilitas pendidikan yang lengkap, modul dan kurikulum yang mendukung, dan berbagai hal lainnya. Oleh karena itu, pendidikan inklusi memerlukan waktu yang sangat panjang untuk mencapai keberhasilan yang maksimal.

Akan tetapi meskipun penyelenggaraan pendidikan inklusi di Indonesia di berbagai daerah masih mengalami kesulitan diharapkan para tenaga pendidik dan tenaga kependidikan bersama wali murid bersama-sama berpartisipasi mewujudkan cita-cita inklusi ini. Sesungguhnya cita-cita inklusi ini adalah cita-cita yang sangat luhur karena menghargai setiap makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Adapun acara menghargai mereka adalah dengan tidak mencaci maki, mengejek, menghina, mengolok-olokkan kekurangan yang mereka memiliki tetapi justru harus menghargai dan menghormati dan yang terpenting saling membantu untuk memberikan semangat bahwa kita masing-masing di dunia ini terlahir dengan membawa keunikannya masing-masing.

Setiap kekurangan jangan jadikan kelemahan tetapi harus diyakinkan dan digali bahwa kelebihan itu ada pada setiap individu. Kewajiban kitalah untuk menggali potensi keunikan masing-masing diri kita, terutama yang ada pada anak berkebutuhan khusus. Dengan menggabungkan mereka ke dalam pendidikan inklusi dan memberikan hak

pendidikan inklusi yang sebenarnya maka dapat meyakinkan mereka bahwa kita ada dan selalu bersama dan tak pernah memandang perbedaan menjadi sebuah masalah yang bisa mendiskriminasikan kita. Semoga pendidikan inklusi yang berlangsung di Indonesia khususnya akan berjalan maksimal dan membuahkan hasil yang maksimal juga terutama dalam pendidikan budi pekerti yakni menghargai setiap perbedaan. Semoga...

Daftar Pustaka

- Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, *Tulkit LIRP Merangkul Perbedaan: Perangkat untuk Mengembangkan Lingkungan Inklusif, Ramah terhadap Pembelajaran*, Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional, Braillo Norway, IDP Norway dan Hellen Keller International, 2004.
- Hadis, Abdul, *Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus Austistik*, Bandung: Alfabeta, 2006.
- Horton, Paul.B dan Hunt, Chester.L, *Sosiologi Jikid 1 Edisi keenam*. Jakarta : Erlangga, 1984.
- Irwani, Ricka, *Perlakuan Orang Tua Terhadap Anak Penyandang Cacat Mental Studi di Kelurahan Tarok Dipo Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi*. Skripsi Jurusan Sosiologi. Padang: Universitas Andalas, 2011.
- Jamaris, *Bahan Ajar Mata Kuliah Pendidikan Anak Usia Dini*. Padang : Universitas Negeri Padang Pascasarjana Program Doktor Ilmu Pendidikan, 2010.
- Liando, Jopyy dan Dapa Aldijon, *.Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus dalam Perspektif Sistem Sosial*. Jakarta : Departemen Pendidikan Nasional, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Direktirat Ketenagaan, 2007.

- Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000.
- Mudjito, dkk, *.Pendidikan Inklusif*. Jakarta : Baduose Media, 2012.
- Ormrod, Jeanne Ellis, 2009.*Psikologi Pendidikan Membantu Siswa Tumbuh dan Berkembang. Jilid 1*, Edisi ke enam. Jakarta : Erlangga.
- Pandji, Dewi, *Sudahkah Kita Ramah Anak Spesial Needs?*. Jakarta : Elex Media Komputindo Kompas Gramedia, 2013.
- Santoso, Hargio, *Cara Memahami dan Mendidik Anak Berkebutuhan Khusus*. Yogyakarta :Gosyen Publishing, 2012.
- Singarimbun, Masri dan Sofia Effendi, *Metode Penelitian Survey*. Jakarta : LP3ES, 1989.
- Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1982.
- Soetrisno, Loekman, *Menuju Masyarakat Partisipatif*. Yogyakarta : Kanisius, 1995.
- Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Depdiknas No.380 /C.66/MN/2003, 20 Januari 2003
- Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
<http://pendidikanabk.blogspot.com/2011/09/> diakses tanggal 1 maret 2014 jam 15.00, *landasan pendidikan inklusif*
<http://www.scribd.com/doc/101514501> diakses tanggal 7 April 2014 jam 10.10, *pedoman umum inklusi*.
<http://www.antarasumut.com/kemendikbu-d-dorong-sumbar-selenggarakan-pendidikan-inklusif/> oleh Derizon Yazid, diakses tanggal 7 April 2014 jam 22:43, *Kemendikbud Dorong Sumbar Selenggarakan Pendidikan Inklusif*